

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana, baik bencana karena peristiwa alam seperti gempa bumi dan tsunami atau gelombang dahsyat, letusan gunung api, banjir, tanah longsor dan musim kemarau panjang, karena perilaku manusia/industri/teknologi seperti kebakaran hutan/lahan/permukiman, kontaminasi lingkungan hidup, kebocoran bahan beracun atau bahkan kerusuhan sosial. Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk salah satu daerah yang berpotensi terjadi bencana alam. Letak geografis Daerah Istimewa Yogyakarta yang daerahnya terdapat gunung berapi aktif menjadikan Pemerintah Yogyakarta harus mengantisipasi dengan perhatian yang khusus, supaya apabila terjadi bencana alam yang tak terduga maka tidak terlalu memakan korban dan masyarakat juga tanggap terhadap bencana.

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) merupakan suatu organisasi yang berkedudukan di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial melalui Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial c.q Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah suatu organisasi atau gugus yang berbasis masyarakat, bergerak dibidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, mempunyai peran penting dalam menangani korban-korban bencana, membantu masyarakat agar memahami tentang kemampuan diri dan kondisi lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan kerawanan terhadap bencana (Gunawan, 2009). Tanggung jawab TAGANA untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana dapat berbentuk kesiapsiagaan (*preparedness*), yaitu tindakan-tindakan yang memungkinkan

pemerintah, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat (Carter dalam Gunawan, 1991).

Menurut Sigit Alfianto, Permasalahan di TAGANA DIY pada saat ini masih menyangkut keanggotaan yang masih kurang memahami tugas yang dilaksanakannya, karena perhatian masyarakat terhadap isu suatu bencana masih sangat kurang. Para anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) DIY memiliki anggota yang bervariasi, mulai dari yang berusia muda maupun yang sudah berusia tua serta dari berbagai unsur lulusan pendidikan formal yang bervariasi, hal ini juga mempengaruhi dalam menjalankan sistem gugus tugas TAGANA DIY. Kendala lain yang dihadapi TAGANA DIY adalah masih minimnya jumlah komunitas bencana atau Kampung Siaga Bencana yang ada di Yogyakarta, padahal jika dilihat potensi bencana alam yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah besar (Nuryani, 2016:3).

Dalam penanganan bencana pada masa tanggap darurat, TAGANA DIY akan melaksanakan empat klaster yaitu logistik dan dapur umum, shelter dan penanganan pengungsi, psikososial, dan pendamping sosial. Anggapan masyarakat umum masih menganggap TAGANA DIY hanya berfokus pada penanganan klaster logistik dapur umum dan penanganan pengungsi (fisik) sedangkan program psikososial dan pendamping sosial masih belum banyak diketahui masyarakat umum (Nuryani, 2016:3). Empat klaster ini masuk dalam tahapan tanggap darurat yang biasa dilakukan oleh TAGANA DIY dalam penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sudah sesuai dengan konsep dan SOP TAGANA DIY dalam menanggulangi bencana.

Upaya pengurangan risiko bencana telah menjadi bagian dari langkah penanggulangan bencana yang harus dilakukan. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun telah menjadi tanggung jawab semua pihak. Termasuk

kegiatan-kegiatan dan aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang terlembagakan dalam penanggulangan bencana seperti Tagana. Peran Tagana lebih diprioritaskan pada kegiatan pencegahan dan tanggap darurat sedangkan kegiatan pasca bencana tidak sepenuhnya menjadi kewajiban Kementerian Sosial melainkan tanggung jawab dari semua pihak. Tagana sebagai elemen masyarakat yang dinilai paling dekat dengan penduduk secara horizontal, sehingga peran tagana sangatlah krusial dalam penyampaian informasi pada lembaga yang berwenang untuk ikut berkoordinasi dalam kegiatan maupun aktifitas yang berkaitan dengan kebencanaan di lingkungan masyarakat.

Melihat begitu pentingnya program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam kesiapsiagaan menanggulangi bencana alam di Kota Yogyakarta, maka melalui latar belakang di atas, Penulis ingin melakukan penelitian dan menguraikan mengenai **Monitoring dan Evaluasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam Kesiapsiagaan Menanggulangi Bencana di Kota Yogyakarta**. Mengambil Kota Yogyakarta sebagai tempat penelitian karena, mengingat Kota Yogyakarta rawan akan bencana alam.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Taruna Siaga Bencana dalam kesiapsiagaan menanggulangi bencana di Kota Yogyakarta ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana monitoring dan evaluasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Kesiapsiagaan menaggulangi bencana di Kota Yogyakarta.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta memperkaya kajian yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi suatu program kerja dari organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Sosial Kota Yogyakarta yang menaungi organisasi Tagana.

b. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi stakeholders dan Dinas terkait, terutama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Dinas Sosial pada peningkatan kesiapsiagaan tagana dalam penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Mendapatkan gambaran yang jelas terkait program peningkatan kapasitas tagana dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta yang sudah dilaksanakan. Selain itu diharapkan penelitian ini akan mendapatkan sebuah informasi ilmiah mengenai proses dan hasil monitoring dan evaluasi Dinas Sosial dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Skripsi karya Aning Kholisah, 2013 yang berjudul "Peran Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Kegiatan Pra-Bencana untuk Kesehatan Mental Korban Bencana (Studi Kualitatif pada Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Jember)"

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesehatan mental korban bencana di Kabupaten Jember, serta untuk mengetahui sejauh mana peran Taruna Siaga Bencana (TAGANA) saat Pra-Bencana di Kabupaten Jember.

Jurnal karya Fauzan Ersad dan Zainal Hidayat yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana (Studi kualitatif deskriptif di Kota Semarang)” penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2012 di Kota Semarang melalui tiga fenomena yaitu pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang masih menemui kendala dalam upaya penanggulangan bencananya.

Tesis karya Ahmad Nuryani yang berjudul “Pola dan strategi Penanggulangan Bencana Alam (studi kualitatif pada Taruna Siaga Bencana DIY)” penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu jawaban dari (1) apa saja kegiatan program Tagana DIY? (2) Bagaimana pola dan strategi Tagana DIY dalam menanggulangi bencana alam di DIY? (3) Apa saja hambatan-hambatan Tagana DIY dalam penanggulangan bencana alam di DIY? Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola Tagana DIY dalam menanggulangi bencana dapat dikategorikan menjadi tiga pola yaitu: (1) pra-bencana, dengan strategi mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan peringatan dini (2) tanggap darurat, dengan strategi bersifat merespon bencana yang terjadi (3) pasca bencana, dengan strateginya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penelitian oleh Radlus, A., Budiono, B., & Mirza, Y. (2012) dengan judul “*Efektivitas Organisasi Tagana (Taruna Siaga Bencana) Dalam Menanggulangi*

Bencana Alam Di Kota Bengkulu (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNIB)” dengan hasil penelitian yaitu TAGANA telah melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam di Kota Bengkulu secara seefektif mungkin sehingga tujuan dari penanggulangan bencana ini telah tercapai. Namun dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala disebabkan karena dana untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana mengalami keterlambatan dalam pencairan sehingga dalam tahap pelaporannya pun juga mengalami keterlambatan.

Jurnal penanggulangan bencana karya Setya Winarno (2011) yang berjudul *House seismic vulnerability and mitigation strategies: Case Of Yogyakarta City*. Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Yogyakarta tentang kerentanan ancaman gempa bumi sangat tinggi akan tetapi masih banyak rekonstruksi rumah menggunakan bahan bangunan yang berat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 84,4% rumah yang di Yogyakarta adalah rumah non rekayasa yang sangat rentan terhadap gempa bumi. Tahapan ini merupakan upaya pengurangan dampak resiko yang akan ditimbulkan jika terjadi bencana gempa bumi.

Skripsi yang ditulis An Nur Syaiful (2015) dengan judul Implementasi Karakter Peduli Sosial dan Kerja Keras dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Kasus Taruna Siaga Bencana Kabupaten Ngawi). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan, kendala, solusi dan implementasi karakter peduli sosial dan kerja keras Tagana di Kabupaten Ngawi. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan metode interaktif yang mempunyai beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Skripsi oleh Tri Puspita Sari (2014) dengan judul “Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Alam di Desa Panakkukang di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggambarkan tentang bagaimana bentuk penanggulangan bencana dan bagaimana peran masyarakat dalam menanggulangi resiko terjadinya bencana alam di Desa Panakkukang.

Penelitian oleh A. Samosir (2015) “Efektivitas Penanggulangan Bencana Puting Beliung di Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi kejadian bencana puting beliung di Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan BPBD Serdang Bedagai terkhusus dalam penanggulangan bencana Puting Beliung di Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BPBD setempat dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat perbedaan dai penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu memberikan perbedaan seperti : penelitian oleh Aning Kholisah (2013) memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kesehatan mental korban bencana di Kabupaten Jember. Serta penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Ersad dan Zainal Hidayat (2012) yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2012 di Kota Semarang melalui tiga fenomena yaitu pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya oleh Ahmad Nuryani yang bertujuan untuk untuk mencari tahu jawaban dari (1) apa saja kegiatan program Tagana DIY? (2) Bagaimana pola dan strategi Tagana DIY dalam menanggulangi bencana alam di DIY? (3) Apa saja hambatan-hambatan Tagana DIY dalam penanggulangan bencana alam di

DIY. Penelitian yang dibahas oleh penulis terkait monitoring dan evaluasi program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Kesiapsiagaan Menanggulangi Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk melihat bagaimana program Taruna Siaga Bencana dikaji dengan menggunakan teori monitoring dan evaluasi melalui indikator-indikator tersebut.

1.6 KERANGKA TEORI

A. MONITORING DAN EVALUASI

1. Pengertian

Menurut Casely & Kumar (dalam Rismawanto, 2016:8), monitoring adalah penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan terkait dengan fungsi tiap-tiap program dalam lingkup jadwal pelaksanaan dan terhadap penggunaan input dari suatu proyek tersebut oleh kelompok sasaran dalam ranah harapan-harapan rancangan. Monitoring juga diartikan sebagai kegiatan suatu proyek yang integral, dimana merupakan bagian terpenting dari suatu perwujudan manajemen yang baik dan oleh karena itu dikatakan sebagai bagian yang integral dari manajemen sehari-hari. Sedangkan menurut Calyton dan Petry (dalam Syamsi, 2014:6), Monitoring sebagai proses dalam hal mengumpulkan, mencatat, mengukur, memproses, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program maupun proyek.

Monitoring adalah kegiatan pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis tentang bagaimana suatu organisasi atau program sedang berjalan. Monitoring didasarkan pada sasaran yang ditetapkan dan aktivitas yang direncanakan selama tahapan perencanaan program. Monitoring adalah yaitu suatu pengumpulan analisa informasi yang (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis serta kontinu tentang suatu kegiatan sehingga dapat

dilaksanakan atau dilakukan tindakan korelasi untuk suatu penyempurnaan program/proyek selanjutnya (Hikmat,Dr. Harry,2010).

Monitoring adalah fungsi berkelanjutan yang menggunakan kumpulan data yang sistematis mengenai indikator spesifik, untuk memberikan manajemen dan pemangku kepentingan utama dari intervensi pembangunan berkelanjutan dengan indikasi tingkat kemajuan dan pencapaian tujuan dan kemajuan dalam penggunaan dana yang dialokasikan (Hamilton & Ziervogel, 2008:3).

Menurut Casely dan Kumar (dalam Rismawanto, 2016:8) Evaluasi adalah penilaian berkala terhadap relevansi, penampilan, efisiensi dan dampak proyek didalam konteks yang sudah ditetapkan. Evaluasi biasanya menggunakan perbandingan yang membutuhkan informasi dari luar proyek - tentang waktu, daerah atau populasi. Evaluasi yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya direncanakan untuk dapat menentukan keadaan sebuah objek dengan menggunakan instrumen serta hasilnya dapat dibandingkan dengan suatu patokan untuk kemudian menjadi kesimpulan (Yunanda dalam Sapitri:2014).

Menurut Griffin & Nix (dalam Widoyoko:2005), menyatakan bahwa evaluasi biasanya didahului oleh suatu penilaian (*assessment*),sedangkan penilaiandidahului dengan pengukuran, dimana pengukuran diartikan sebagaisuatu kegiatan guna membandingkan pengamatan dengan sebuah kriteriapenilaian (*assessment*) yang ada. Kriteria penilaian yang dimaksud yaitu kegiatan untuk menafsirkan serta menggambarkanhasil dari suatu engukuran, sedangkan evaluasi digunakan guna menentukan suatu nilai serta implikasi dari perilaku.

Evaluasi adalah penilaian sistematis dan obyektif mengenai proyek, program atau kebijakan yang sedang berjalan atau selesai, disain, implementasi

dan hasilnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui relevansi dan pemenuhan tujuan, efisiensi pengembangan, efektivitas, dampak dan keberlanjutan. evaluasi harus memberikan informasi yang kredibel dan berguna, memungkinkan penggabungan pelajaran dipelajari ke dalam proses pengambilan keputusan baik dari penerima maupun donor. Evaluasi juga mengacu pada proses penentuan nilai atau kepentingan suatu kegiatan, kebijakan atau program. Sebuah penilaian, se-sistematis dan seakurat mungkin, tentang intervensi pembangunan yang direncanakan, sedang berlangsung, atau selesai (Hamilton & Ziervogel, 2008:3).

Jadi dapat disimpulkan pengertian monitoring yaitu suatu proses memperoleh data secara berkala dengan cara mengamati bersama suatu kegiatan yang telah terlaksana sehingga hasil yang didapat relevan dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan atau kebijaka dasar guna terfokusnya pada tujuan. Dengan cara ini kita dapat tahu apakah progrm yang dirancang tersebut sudah dilaksanakan dengan baik sebagaimana seharusnya sesuai dengan apa yang dirancang, ada atau tidak hambatan yang terjadi serta bagaimana pelaksanaan program tersebut dapat mengatasi hambatan yang ada. Monitoring terhadap suatu hasil perancangan yang tengah berlangsung menjadi alat kontrol yang baik dalam seluruh proses pelaksanaan. Dengan kata lain, monitoring dapat menjadi tolak ukur atas umpan balik dari kebutuhan program atau kegiatan yang sedang berjalan, dengan mengetahui kebutuhan tersebut maka pelaksanaan program akan lebih mempersiapkan kebutuhan yang kurang.

Sedangkan evaluasi diartikan sebagai suatu proses penilaian terhadap pentingnya suatu kegiatan ataupun kebijakan sehingga kita dapat membandingkan apakah kegiatan atau kebijakan yang dibuat itu sudah efektif ataupun efisien.

Evaluasi juga memberikan gambaran mengenai informasi yang telah diperoleh sehingga keputusan akhir dapat ditentukan. Evaluasi diartikan sebagai proses dari pengukuran terhadap efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya untuk mencapai tujuan. Sehingga menurut penulis evaluasi dapat digunakan untuk menentukan keputusan terhadap hasil yang telah diperoleh dari suatu kegiatan ataupun kebijakan yang berdampak pada kinerja suatu sistem.

Dalam sistem monitoring kegiatan, akan melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi unsur-unsur penyusun sistem yaitu masukan (*input*), proses dan keseluruhan (*output*), serta memadukannya secara menyeluruh dari unsur-unsur tersebut. Masukan (*input*) meliputi sumber daya manusia, dana pendukung kegiatan monitoring dan evaluasi, metode yang digunakan, format-format sebagai instrumen monitoring, serta teknologi yang digunakan. Proses monitoring dan evaluasi lebih kepada bagaimana menyusun laporan hasil monitoring kegiatan. Sedangkan keluaran (*output*) adalah kualitas laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (Hamilton & Ziervogel, 2008:4). Adapun tujuannya untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemajuan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dicapai, serta untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi pelaksanaan fisik dan penyerapan dana dibanding sasaran rencana fisik dan pembiayaan yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mencatat perkembangan program atau kegiatan, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan secara terus-menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul, merumuskan pemecahan masalah, membuat laporan kemajuan secara rutin, dalam kurun waktu yang pendek. Ada lima kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi (Hamilton & Ziervogel 2008:5) :

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mencatat perkembangan program atau kegiatan.
2. Memantau program dan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan secara terus-menerus.
3. Mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul
4. Merumuskan pemecahan masalah.
5. Membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu yang pendek.

Monitoring dan Evaluasi program adalah program serangkaian aktivitas untuk mengetahui (Casely dan Kumar dalam Rismawanto, 2016:10) :

1. Apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.
2. Adakah hambatan yang terjadi.
3. Bagaimana pelaksanaan mengatasi hambatan tersebut (siapa pihak yang bertanggungjawab).

2. Nilai-nilai Monitoring dan Evaluasi

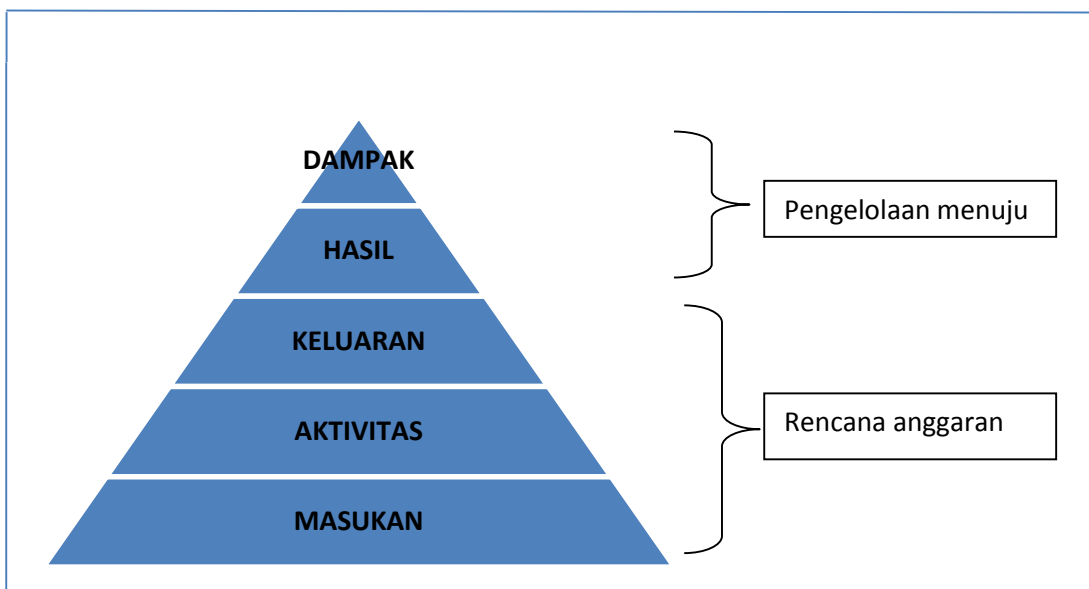
Nilai membantu untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai standar yang baik dari administrasi publik atau baik standar kinerja. Nilai meliputi konsep efektivitas, efisiensi, daya tanggap dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan. Bahkan, ini tidak hanya konsep tapi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus ditaati. Konstitusi Afrika Selatan menyebutkan bahwa "administrasi publik harus diatur oleh nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip diatur dalam Konstitusi" dan kemudian sembilan daftar nilai.

Nilai-nilai memberikan perspektif tambahan dari yang administrasi publik dapat dievaluasi. Misalnya, prinsip tanggap terhadap kebutuhan untuk

mengevaluasi kinerja dari perspektif kebutuhan klien, atau prinsip orientasi pembangunan mensyaratkan sifat dasar dari Layanan Umum instrumen untuk pengembangan harus dievaluasi (Hamilton & Ziervogel, 2008:26).

3. *Logic Models*

Cara disederhanakan untuk membuat konsep program adalah dengan menggunakan model logika. Model logika membantu menjelaskan hubungan antara sarana dan tujuan. Sebuah penyederhanaan Model logika terdiri dari hirarki input, kegiatan, keluaran, hasil dan dampak dapat di lihat dari gambar berikut (Hamilton & Ziervogel 2008:42).



Gambar 1.1 Komponen Logic Model

Sumber : Hamilton & Zieervogel, 2008 : 42.

Model logika dapat dijelaskan oleh logika proses produksi. Dalam proses produksi sumberdaya; seperti staf, peralatan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan beberapa produk dan proses pelayanan. Terdiri dari tugas-tugas yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu, misalnya mengumpulkan informasi,

menganalisis informasi, menarik kesimpulan dan menulis laporan, sekaligus menerapkan pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dari waktu ke waktu. (Hamilton & Ziervogel, 2008:43).

Sebuah model logika adalah metode analisis untuk memecah program menjadi komponen-komponen logis untuk memfasilitasi evaluasi. Sebuah model logika membantu untuk menjawab pertanyaan seperti "Apakah tujuan dari Program tercapai?" dan "Apakah sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tepat dan yang mereka kompeten dilaksanakan?" Sejak efisiensi dapat didefinisikan sebagai rasio antara input dan output dan efektivitas sebagai hubungan antara keluaran dan hasil, logika model membantu untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas program. model logika yang digunakan sangat luas sebagai kerangka kerja untuk merancang sistem monitoring atau evaluasi struktur.

Berikut ini adalah model logika (Hamilton & Zieervogel, 2008: 44) :

1. Input

Semua sumber daya yang berkontribusi terhadap produksi dan pengiriman output. Input. Apa yang kita gunakan untuk melakukan pekerjaan'. Mereka termasuk keuangan, personil, peralatan dan bangunan.

2. Activities

Proses atau tindakan yang menggunakan berbagai input untuk menghasilkan output yang diinginkan dan akhirnya hasil-hasil. Pada intinya, kegiatan menggambarkan 'apa yang kita lakukan'.

3. Outputs

Produk akhir, atau barang dan jasa yang dihasilkan untuk pengiriman. Output mungkin didefinisikan sebagai "apa yang kita memproduksi atau menyampaikan .

4. Outcomes

Hasil jangka menengah untuk penerima tertentu yang merupakan konsekuensi logis mencapai hasil spesifik. Hasil harus berhubungan jelas untuk tujuan strategis lembaga ini dan tujuan yang ditetapkan dalam rencana. Hasil yang 'apa yang kita ingin capai'.

5. Impacts

Hasil mencapai hasil yang spesifik, seperti mengurangi kemiskinan dan menciptakan pekerjaan.

4. Sistem Monitoring dan Evaluasi berbasis hasil

Dalam hal monitoring dan evaluasi terdapat 10 (Sepuluh) langkah dalam sistemnya berbasis hasil (*Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System, 2004*), yaitu :

1. Melakukan Penilaian Terhadap Kesiapan

Penilaian Kesiapan menyediakan kerangka berpikir analitik untuk menentukan seberapa jauh kemampuan negara untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan di dalam pencapaian tujuan pembangunan. Penilaian ini menggunakan standar kapasitas dan sistem monitoring dan evaluasi di negara tersebut. Tahap ini diibaratkan fase membangun pondasi untuk sebuah bangunan.

Dalam melaksanakan penilaian terhadap kesiapan, yang perlu diperhatikan antara lain yaitu jumlah intensif dan kebutuhan guna mendesain serta membangun sebuah sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil. Selanjutnya yaitu memperhatikan peran dan juga responsifitas dari struktur yang ada untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan standar kapasitas untuk sebuah sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil.

Langkah pertama dapat menentukan seberapa jauh kemampuan negara untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan di dalam pencapaian tujuan pembangunan. Dalam menentukan arah tujuan pembangunan dapat dikerjakan secara bersama-sama agar tujuan pembangunan tersebut berjalan lancar. Arah tujuan pembangunan dapat menggunakan cara penilaian standar kapasitas dan sistem monitoring serta evaluasi. Dengan adanya tahap penilaian tersebut mempermudah pelaku kegiatan untuk memajukan kegiatan yang sedang dilaksanakannya serta standar yang dipakai sudah terlaksana baik.

2. Menyepakati Hasil Untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Adapun proses dalam penyusunan dan menyepakati *outcome* yang dapat dilakukan pertama yaitu mengidentifikasi representasi stakeholder yang spesifik, yang kedua yaitu mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian (hal apa yang diperhatikan) para kelompok *stakeholder*, yang ketiga yaitu menerjemahkan masalah menjadi *statement outcome*, dan yang terakhir yaitu disagregasi untuk mendapatkan kunci *outcome* yang diinginkan.

Outcome yang sudah disepakati bersama menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut dapat terbentuk melalui pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.

Dalam menyepakati *outcome* pelaku kegiatan akan bekerja keras agar kegiatan

yang sedang maupun nantinya akan dilaksanakan secara baik dan terhindar dari kesalahan yang lalu.

3. Menyeleksi Indikator-indikator Kunci Untuk Memonitor Hasil

Selama monitoring *outcome* dapat menggunakan cara seperti penyeleksian indikator-indikator kunci, yakni:

a) *Clear*

Indikator *clear* yang artinya bersih dapat diterapkan dalam memonitoring *outcome* karena indikator tersebut mengutamakan hal-hal yang bersifat positif yang dapat digunakan lebih baik dari sebelumnya.

b) *Relevant*

Untuk indikator yang kedua, dalam memonitoring *outcome* menggunakan cara yang relevan. Relevan yang dapat diterima oleh semua pihak, agar *outcome* tersebut terlaksana dengan baik dan lancar.

c) *Economic*

Dalam pembangunan *outcome* pastinya akan terlaksananya indikator ekonomi yang dapat menunjang monitoring. Indikator ekonomi sangat penting karena melakukan pembangunan pastinya akan membutuhkan sebuah dana agar dapat terlaksana dan indikator ekonomi dapat menjadi penunjang untuk keberhasilan suatu pembangunan dan sebagainya.

d) *Adequate*

Monitoring *outcome* harus dapat memadai dalam semua hal-hal agar pelaksanaannya lancar. *Outcome* yang sudah memadai dapat dikerjakan

dengan baik dan mudah agar pelaku kegiatan dapat mencermati monitoring tersebut dengan baik.

e) *Monitorable*

Outcome yang sedang terlaksana dapat dipantau agar pelaksanaannya dapat terkendali dengan baik. Pantauan tersebut berguna karena dapat menjauhkan sifat-sifat negatif yang dapat merusak *outcome* tersebut. serta pemantauan tersebut wajib dilaksanakan oleh pelaku kegiatan.

Indikator-indikator kunci untuk memonitoring *outcome* ini kemudian dapat disingkat menjadi “CREAM” yang dapat memudahkan pelaku kegiatan dalam penerapan monitoring sebuah kegiatan.

4. Indikator data yang mendasar

Dalam pembahasan terkait dengan indikator data yang mendasar, maka diperlukan pertanyaan-pertanyaan kunci guna mendapatkan indikator dasar tersebut. Adapun pertanyaan yang menjadi kunci yaitu pertanyaan yang terkait dengan sumber data, metode pengumpulan data, pihak yang melakukan pengumpulan data, intensitas pengumpulan data, kesulitan dan biaya, analisator data, pihak yang menjadi pelapor data, serta pengguna data.

5. Merencanakan untuk kemajuan – memilih target hasil

Di tahap ini, dikatakan bahwa target adalah hasil yang ingin dicapai sesuai dengan *outcome* dan tujuan. Selain itu, setiap satu indikator diharapkan memiliki satu target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dalam merencanakan kemajuan suatu *outcome* pelaku kegiatan dapat memilih target hasil karena dengan adanya pemilihan target tersebut dapat terkoordinasi dengan baik. Serta pelaku kegiatan dapat mudah memilih target-target yang

bernilai positif dan menjadi penyemangat dalam melaksanakan atau kedepannya dalam kegiatan agar mejadi maju.

6. Monitoring Untuk Hasil

Kegiatan monitoring sangat penting dalam pengawasan kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan seperti dulu. Dalam melakukan monitoring dapat menggunakan sistem Logic Models yang berisi lima sistem yang dapat berguna untuk memonitoring kegiatan. Tahapan implementasi sendiri terdiri dari input (meliputi finansial, sumberdaya alam dan manusia), aktifitas, dan *output*. Sedangkan pada tahap hasil terdiri dari *goal/impact* dan juga *outcomes*.

7. Peran Evaluasi

Adapun peran dari evaluasi ini antara lain yaitu untuk membantu mengalokasikan sumber daya, membantu memikirkan ulang penyebab-penyebab dari masalah yang terjadi, mempermudah mengidentifikasi masalah yang muncul, mendukung pembuatan keputusan dengan berbagai alternatif, mendukung reformasi sektor publik dan juga inovasi, serta membangun konsensus tentang penyebab dan cara merespon suatupermasalahan.

8. Pelaporan

Dalam tahap ini yang dapat dilakukan yaitu melakukan hasil monitoring dan juga evaluasi yang telah dilakukan. Hal ini berjuan untuk mengetahui target dan *audience* dalam pelaporan serta memberkan atau mempresentasikan data yang jelas dan dalam bentuk yang mudah dimengerti.

9. Penggunaan Penemuan

Adapun fungsi dari penggunaan penemuan bisa dimanfaatkan untuk antara lain yaitu menanggapi pejabat terpilih dan permintaan publik atas akuntabilitas,

membantu memformulasikan dan meratakan permintaan anggaran negara, membantu membuat keputusan alokasi sumber daya operasional, memicu secara mendalam pemeriksaan tentang apa ada masalah kinerja dan koreksi apa saja yang dibutuhkan, membantu memotivasi personil untuk review melanjutkan pembuatan program peningkatan, merancang dan memonitor bayaran kontraktor dan penerima, menyediakan data secara spesial dalam evaluasi program, membantu menyediakan layanan yang lebih efisien, mendukung upaya perencanaan strategis jangka panjang dan lainnya (dengan memberikan informasi dasar dan kemudian melacak kemajuan), serta berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan.

10. Keberlanjutan Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Hasil

Sebuah program atau kebijakan dapat dikatakan layak untuk di teruskan atau dilanjuta jika memenuhi kriteria seperti ditemukannya permintaan (*demand*) yang jelas, peran yang jelas dan juga tanggung jawab yang nyata, adanya kepercayaan dan informasi yang kredibel, terwujudnya akuntabilitas, kapasitas dan intensif yang memadai.

B. TAGANA

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Forum koordinasi Tagana adalah wadah kelembagaan tempat untuk bertukar informasi, pengalaman serta koordinasi kegiatan antar anggota Tagana yang terdiri dari forum Koordinasi Provinsi dan Forum koordinasi Kabupaten/kota.

TAGANA pada hakekatnya adalah wadah berhimpun seluruh kekuatan komponen penanggulangan bencana berbasis masyarakat khususnya dari unsur generasi muda. Kata-kata Taruna memiliki arti generasi muda, kata Siaga memiliki arti segala upaya kesiapsiagaan dalam kondisi apapun dan kata Bencana adalah tantangan dan masalah yang harus diselesaikan.

Pemerintah melalui Departemen Sosial RI ingin mengakomodir potensi masyarakat yang telah membentuk organisasi, satuan-satuan atau kelompok Penanggulangan Bencana yang selama ini telah ada di Negara dengan berbagai nama dan atribut seperti dari Karang Taruna, Pecinta Alam, ORMAS, ORPOL, Organisasi Pemuda, Organisasi Profesi, Relawan dan lain-lain. Tujuan utama pemerintah untuk menyatukan mereka tidak bermaksud meniadakan organisasi induk yang sudah ada untuk berbuat menolong sesama tetapi untuk menyatukan visi, misi dan tindakan dalam Penanggulangan Bencana Indonesia dengan nama Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

Tagana ditetapkan dengan maksud untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana, serta bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana. Tagana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada menteri sosial melalui Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Dalam proses Kesiapsiagaan menanggulangi bencana, Tagana mengupayakan para anggotanya untuk mengikuti pelatihan, kursus dan simulasi. Proses ini dilakukan agar pada saat terjadi bencana pada anggota/relawan Tagana sudah siap dan tanggap dalam menjalankan pekerjaannya dalam bencana.

Jadi di waktu kini dan mendatang TAGANA akan menjadi perekat dan pemersatu seluruh komponen dan unsur Penanggulangan Bencana yang berasal dari berbagai organisasi dan kelompok. Untuk itu organisasi atau komponen apapun yang terlibat dalam kebencanaan yang berasal dari unsur masyarakat di Indonesia sebaiknya tergabung dalam Korps yang sama yaitu TAGANA, sebab didalam TAGANA akan diberikan atribut yang sama, pengakuan berupa sertifikat, Nomor Induk Anggota dan Intensif serta aturan main yang sama di seluruh Indonesia sehingga eksistensinya diakui oleh negara (Fajar, 2017:23).

C. KESIAPSIAGAAN

Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah suatu kondisi suatu masyarakat yang baik secara individu maupun kelompok yang memiliki kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen bencana secara terpadu. Kesiapsiagaan adalah bentuk apabila suatu saat terjadi bencana dan apabila bencana masih lama akan terjadi, maka cara yang terbaik adalah menghindari resiko yang akan terjadi, tempat tinggal, seperti jauh dari jangkauan banjir. Kesiapsiagaan adalah setiap aktivitas sebelum terjadinya bencana yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas operasional dan memfasilitasi respon yang efektif ketika suatu bencana terjadi.

Menurut Pribadi (2008), kesiapsiagaan adalah tindakan yang terlaksana dalam bentuk suatu antisipasi bencana guna memastikan bahwa tindakan yang terlaksana tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan tepat saat terjadi maupun setelah bencana. Kesiapsiagaan adalah seluruh kegiatan sebelum suatu bencana terjadi yang bertujuan

dalam pengembangan kapasitas operasional serta memfasilitasi respon efektif ketika terjadinya bencana. Adapun terjadinya perubahan pandangan terhadap penanggulangan bencana yaitu tidak adanya pemikiran bahwa penanggulangan bencana adalah suatu aksi saat situasi tanggap darurat melainkan lebih memprioritaskan pada tahap prabencana yang memiliki tujuan untuk mengurangi dampak bencana. Sehingga semua aktivitas dalam cakupan pra bencana lebih diutamakan. Adapun kegiatan kesiapsiagaan secara umum yaitu meliputi: kemampuan menilai resiko, perencanaan siaga, mobilisasi sumber daya, pendidikan dan pelatihan, koordinasi, mekanisme respon, manajemen informasi, serta gladi atau simulasi.

Kesiapsiagaan menurut Carter (dalam Cholid:2017) adalah suatu tindakan yang diharapkan mampu ditanggapi oleh masyarakat, pemerintah, organisasi, individu maupun komunitas atas terjadinya bencana secara cepat dan tepat. Kesiapsiagaan merupakan kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadinya bahaya-bahaya alam untuk meramalkan dan mengingatkan orang akan kemungkinan adanya kejadian bahaya, mengevakuasi korban dan harta benda jika mereka terancam dan untuk memastikan respons yang efektif, contohnya dengan menumpuk bahan pangan (Charlotte Benson dkk, 2007 dalam MPBI, 2009). Dalam siklus manajemen bencana, upaya kesiapsiagaan termasuk dalam fase pengurangan resiko sebelum terjadinya bencana. Pergeseran konsep penanganan bencana menjadi paradigma pengurangan resiko bencana semakin menekankan bahwa upaya kesiapsiagaan bencana merupakan salah satu tahapan penting untuk mengurangi besarnya kerugian yang timbul akibat adanya bencana.

D. PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan bencana merupakan sebuah strategi politik yang dinilai cukup penting untuk menjaga kestabilan sosial, ekonomi, dan fisik, pada perkembangan dan

perlindungan nyawa bagi warga Indonesia, yang memiliki karakteristik populasi padat, penggunaan lahan tidak teratur, serta seringnya urbanisasi di lokasi yang rentan terhadap bencana. Pelibatan seluruh komponen masyarakat agar terlibat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana merupakan aspek strategis yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana. Secara institusi pemerintah menjadi bagian yang memegang peranan penting dalam hal ini, dimana pemerintah melalui satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) sesuai dengan bagiannya dapat melakukan tindakan dengan terorganisir termasuk untuk melibatkan masyarakat (DP Sari dkk, 2014).

Penanggulangan bencana merupakan suatu wujud dari upaya untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, hasil pembangunan, alam dan isinya seluruh wilayah Indonesia. Merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang didasarkan pada partisipasi dan peran aktif pemerintah dan masyarakat. Penanggulangan bencana dititikberatkan pada sebelum terjadi bencana atau pra bencana yang meliputi deteksi dini, pencegahan, peringatan dini, penjinakan dan kesiapsiagaan untuk memperkecil, mengurangi dan memperlunak dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Penanggulangan bencana merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang bertujuan mengurangi penderitaan masyarakat dan meningkatkan kehidupan serta penghidupan masyarakat yang sejahtera lahir batin (DP Sari dkk, 2014).

Penanggulangan bencana meliputi kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Tujuan penanggulangan bencana yaitu, memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, kemudian mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan serta kedermawanan dan menciptakan perdamaian bermasyarakat.

A. Pengertian Bencana

Menurut Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis.

Sedangkan menurut *International Strategy Disaster Reductuion* (Nurjanah dkk,2011) bencana merupakan uatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini diluar kemampuan masyrakat dengan segala sumberdayanya.

B. Faktor Penyebab Bencana

Menurut Nurjanah dkk (2011) dalam bukunya tentang manajemen bencana, peyebab terjadinya bencana ada 3 faktor, yaitu :

- 1) Faktor alam (*natural disaster*) terjadi karena fenomena alam dan tanda adanya campur tangan manusia.
- 2) Faktor non-alam (*non-natural disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan bukan juga dari perbuatan manusia.
- 3) Faktor sosial/ manusia (*man made disaster*) yang terjadi mujrni karena perbuatan manusia.

C. Dampak Bencana

Dampak bencana adalah akibat yang timbul dan kejadian bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur/ aset, lingkungan ekosistem, harta benda, gangguan pada stabilitas sosial-ekonomi. Besar kecilnya

dampak bencana tergantung pada tingkat ancaman (*hazard*) atau kerentanan (*vulnerable*) dan kapasitas atau kemampuan untuk menanggulangi bencana.

Dampak bencana menurut Benson and clay dalam nurjanah dkk dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Dampak langsung (*direct impact*) meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset ekonomi.
- 2) Dampak tidak langsung (*indirect impact*) meliputi berhentinya proses produksi, hilangnya sumber penerimaan yang dalam istilah ekonomi disebut *flow value*.
- 3) Dampak sekunder (*secondary impact*) atau dampak lingkungan.

D. Jenis-jenis Bencana

Jenis-jenis bencana menurut Undang-undang no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yaitu :

1. Bencana alam, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat.
4. Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang disebabkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

1.7 DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi Konseptual merupakan pembatasan pengertian dalam memahami konsep yang dikemukakan agar lebih jelas dan menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah-istilah penting antara konsep satu dengan konsep lainnya.

1. Monitoring dan Evaluasi adalah fungsi berkelanjutan yang menggunakan pengumpulan data yang sistematis, serta penilaian yang sistematis dan obyektif mengenai proyek, program atau kebijakan yang sedang berjalan atau selesai, disain, implementasi dan hasilnya. Dalam teori Hamilton & Ziervogel model logika memiliki 5 tahap model logika untuk mengukur sebuah program yaitu : masukan, aktivitas, keluaran, hasil, dan dampak.
2. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
3. Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilaksanakan organisasi, pemerintah serta masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari bahaya-bahaya alam, jatuhnya korban jiwa, dan kerugian harta benda. Tindakan kesiapsiagaan dengan cara pelatihan anggota TAGANA serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
4. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat, jiwa, harta benda, hasil pembangunan, alam dan isinya seluruh wilayah Indonesia. Penanggulangan bencana meliputi kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Tujuan penanggulangan bencana yaitu, memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, kemudian mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan serta kedermawanan dan menciptakan perdamaian bermasyarakat.

1.8 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional yang dimaksudkan untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah dikemukakan. Monitoring dan Evaluasi Program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Kota Yogyakarta. Beberapa tahap untuk melihat program tagana yaitu :

1. Masukan

- a. Sumber Daya Manusia
 - 1) Background dan keahlian SDM Tagana
 - 2) Tagana melakukan rekrutmen sumber daya manusia atau aparatur untuk menjalankan program Tagana
- b. Sumber Daya Finansial dan Non Finansial
 - 1) Anggaran dari Pemerintah Pusat
 - 2) Anggaran dari Pemerintah Daerah
 - 3) Anggaran dari pihak lain
- c. Sarana prasarana
 - 1) Tersedianya peralatan dapur umum
 - 2) Tersedianya gudang penyimpanan barang tanggap bencana
 - 3) Tersedianya kendaraan mobilisasi anggota Tagana

2. Aktivitas Program Aktual

- a. Tagana melakukan pelatihan dan sosialisasi bagi anggota Tagana
- b. Tagana menyusun rencana kontingensi
- c. Menghimpun potensi dan sumber-sumber serta peralatan
- d. SDM Tagana melakukan kajian dan analisa resiko bencana

3. Keluaran

- a. Kualitas anggota Taganapaham dan tahu dengan pekerjaann dalam bidangnya seperti dapur umum, psikososial dan kesekretariatan

- b. Program-program aksi penanggulangan bencana Tagana, dibidang:
 - 1) Dapur umum
 - 2) Psikososial
 - 3) Kesekretariatan
- c. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
- d. Dokumen-dokumen pendukung rencana kontingensi, rencana kerja, rencana operasi program Tagana

4. Hasil

- a. Penempatan anggota Tagana sesuai dengan kualitas
- b. Penerapan program aksi Tagana sesuai dengan bidangnya
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
- d. Pelaksanaan rencana kontingensi, rencana kerja dan rencana operasi program tagana.

5. Dampak

- a. Anggota Tagana berkualitas, mampu dan paham menjalankan tugasnya dalam bidang dapur umum, psikososial dan kesekretariatan.
- b. Anggota Tagana mampu menggunakan alat sesuai dengan bidangnya
- c. Sarana dan prasarana yang bagus dapat dipakai/dikelola dalam mendukung program Tagana
- d. Anggota Tagana mampu memperbaiki program yang telah berjalan

1.9 METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Menurut Bodyan dan Taylor, metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan orang-orang yang diamati. Melalui

metode kualitatif peneliti peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Moleong, 2009:3).

Penelitian mengenai Monitoring dan Evaluasi Tagana Kesiapsiagaan menanggulangi bencana ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, dan fenomena-fenomena yang kompleks dan dinamis, sehingga peneliti mampu memahami situasi sosial secara mendalam. Penelitian deskriptif menyajikan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang ada dimasyarakat, untuk kemudian ditafsirkan secara deskriptif dengan rumusan masalah, tujuan, dan indikator yang digunakan terkait monitoring dan evaluasi Kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana.

B. Lokasi

Penelitian dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Lokasi terkait penelitian yaitu Posko Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Yogyakarta.

C. Unit analisa

Berdasarkan pembahasan yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Yogyakarta yang dianggap relevan dalam artian tepat dijadikan sumber utama dalam data yang diperoleh dari pengurus yang berada di Posko Tagana Kota Yogyakarta.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data :

1. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan konsep penelitian untuk mendapat informasi secara langsung. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi dari hasil mewawancarai pegawai di Dinas

Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dalam unit TAGANA.

Adapun stakeholder yang akan diwawancarai adalah

1. Bapak Sigit Alfianto (Kepala Seksi Bidang PB di Dinas Sosial DIY)
2. Bapak Sigit (Sekretariat Tagana di Dinas Sosial DIY)
3. Anggota Tagana DIY
 - b. Bapak Syahid (Sekretaris Posko Tagana DIY)
 - c. Bapak Totok (Kepala Posko Tagana Kota Yogyakarta)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang mana dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. (Koentjaraningrat, 1997). Dalam hal ini peneliti melihat dari dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh dari Posko Tagana Kota Yogyakarta, serta website dan studi pustaka.

E. Jenis data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan :

1. Data primer

Data Primer menurut Sarwono (2006:129) adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai saran mendapatkan informasi ataupun data. (Sarwono,2006:129).

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung melalui instansi yang berswenang seperti Taruna Siaga Bencana Kota Yogyakarta dan responden lainnya.

2. Data sekunder

Selain data primer, didalam penelitian juga menggunakan data sekunder sebagai metode pengumpulan data. Definisi data sekunder menurut Sarwono adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. (Nazir, 200).

Data sekunder berupa data-data, berita, draft kebijakan, artikel, buku, jurnal, koran, dokumentasi mengenai Taruna Siaga Bencana (TAGANA), referensi atau sumber lain yang dianggap relevan dan berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Tehnik Analisis Data

Merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, maka dalam proses menganalisis data menggunakan analisis dengan hasil data deskriptif berupa bentuk kata-kata tertulis, lisan dari narasumber yang telah diamati dalam mengambil informasi, yang menunjukkan berbagai fakta yang ada dan telah dilihat selama proses penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Salim (2006) teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan serta penyederhanaan data yang telah diperoleh menjadi bentuk tulisan dengan cara membuat ringkasan dari data yang telah diperoleh terkait dengan penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan mengelola data menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan dalam laporan yang sistematis serta mudah dipahami.

4. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan berisi tentang penarikan kesimpulan atas hasil penelitian terhadap data yang sudah diuraikan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada penyelesaian masalah, serta mampu menjawab permasalahan serta tujuan dari penelitian yang ingin dicapai.